M A K A L A H

ENGEMBANGAN WAWASAN TERHADAP PENDIDIKAN SISTEM GANDA

(P S G)

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITERIMA TGL. : 30 OCT 1997
SUMBER / HARGA : H 1
KOLEKSI : K
NO. INVENTARIS : 1214/K/97-P2(2)
KLASIFIKASI : 373.27 Cha P.2

oleh

DR. R. CHANDRA M.PD

Disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh

CTM Negeri Payakumbuh

Tanggal : 26 Desember 1996

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

PENGEMBANGAN WAWASAN TERHADAP PENDIDIKAN SISTEM GANDA *

Dr. R. Chandra, M.Pd **

A.LATAR BELAKANG.

Dewasa ini semakin disadari bahwa keberhasilan pembangunan suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang dimiliki, akan tetapi lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya alam hanyalah merupakan suatu kekayaan yang sifatnya pasif, yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengolah potensi sumber daya yang dimiliki suatu bangsa. Sumber daya manusia berkualitas merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pembangunan, sebaliknya sumber daya yang tidak berkualitas justru menjadi beban pembangunan. Selanjutnya, hampir semua kita tentu sepakat bahwa penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kebutuhan lapangan kerja hanya dapat diperoleh melalui proses pendidikan baik pada tahap pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

Mengacu pada UUSPN No 2 tahun 1989 Pasal 15 Ayat 1, pendidikan menengah diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

---

* Disampaikan pada Seminar "Peranan dan Pengembangan SMK dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan" dalam rangka HUT ke 35 STM Negeri Payakumbuh, 26 Desember 1996.

** Lektor Fisika Mekanika Otomotif pada FPTK IKIP Padang

memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Secara lebih khusus, seperti diatur pada PP NO 29 tahun 1990, Pasal 3 ayat 2, tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Dapatlah disimpulkan bahwa berdasarkan UUSPN, PP, dan GBHN 1993 bahwa setidak tidaknya ada empat misi utama SMK yaitu: (1) menyiapkan tamatan SMK menjadi tenaga kerja trampil untuk mengisi keperluan pembangunan, (2) menyiapkan tenaga kerja profesional tingkat menengah yang memiliki keunggulan kompetitif menghadapi era global, (3) mengubah status siswa dari status beban pembangunan menjadi aset yang bernilai ekonomis tinggi, dan (4) memberi pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai bekal dasar pengembangan diri secara berkelanjutan (Pakrahan: 1995, h. 6).

Misi ini barulah akan dapat dicapai apabila penyelenggaraan pendidikan di SMK dilaksanakan dengan konsep, strategi dan kebijakan yang feasible dan aplicable. Salah satu strategi dalam peningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah menerapkan konsep keterkaitan dan kesepadanan (link and match). Artinya, pendidikan apapun yang diselenggarakan haruslah terkait dan sepadan dengan kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dibiarkan lagi lembaga-lembaga atau program-program pendidikan yang tidak peduli atau tidak proaktif terhadap kebutuhan pasar kerja.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan menjabarkan dan mengoperasionalisasikan konsep link and match ini menjadi suatu model penyelenggaraan pendidikan yang dinamakan Pendidikan Sistem Ganda dan telah dilaksanakan secara bertahap untuk seluruh SMK. Secara sederhana PSG dapat diartikan sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan yang secara sistematis dan sinkron memadukan antara program pendidikan di SMK dengan kegiatan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung pada dunia usaha/dunia industri. PSG melibatkan dunia pendidikan dan dunia usaha/industri secara bersama menjadi pelaku pendidikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi dan sertifikasi.

Tujuan kemitraan ini, di samping tentu untuk memperkokoh link and match antara SMK dengan dunia usaha/dunia industri, juga untuk menghasilkan tenaga-kerja berkualitas sesuai kebutuhan pasar kerja, meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan, serta memberi pengakuan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian proses pendidikan yang lulusannya berguna untuk pengembangan perekonomian bangsa Indonesia.

Sudah tentu bukan merupakan suatu hal yang sederhana untuk meraih tujuan ini, apalagi lulusan SMK berhadapan dengan tantangan era globalisasi. Dengan digulirkannya berbagai kesepakatan dan ratifikasi perdagangan global seperti APEC, AFTA, NAFTA, dan WTO yang menyiratkan semakin tajamnya persaingan antar bangsa, membawa konsekuensi bahwa reformasi pendidikan tidak lagi dituntut hanya sekedar menyiapkan sumber daya berkualifikasi "jago selolah", tetapi harus "jago

kompetisi" di lapangan kerja nyata.

Apabila era pasar global diberlalukan mulai tahun 2 003 (AFTA) dan 2 010 (APEC), maka tenaga kerja asing dari berbagai negara akan menyerbu peluang-peluang kerja di Indonesia. Mereka akan bersaing terbuka dan kompetitif dengan tenaga kerja lokal memperebutkan berbagai okupasi yang ada di tanah air. Ini merupakan konsekuensi dari kesediaan menerapkan mekanisme pasar bebas, sehingga adalah merupakan suatu keharusan bagi SMK untuk menyiapkan kemampuan bangsa yang berdaya saing tinggi dan berkualifikasi global.

B.Reformasi SMK di Indonesia.

Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berorientasi industri, reformasi SMK menjadi sangat penting sebagai penyangga proses industrialisasi. SMK merupakan salah satu jalur transformasi bangsa dalam rangka alih teknologi, terutama dalam mempersiapkan tenaga kerja tingkat menengah. SMK diharapkan dapat memberi bekal cukup kepada calon tenaga teknisi berbagai wujud pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan etos kerja. Lebih dari itu SMK dalam jangka panjang diharapkan dapat mengkondisikan sikap, etos kerja dan budaya masyarakat agraris menjadi budaya masyarakat industri.

Menghadapi era industrialisasi, persoalannya adalah bagaimana SMK seyogyanya dapat mengemas potensi sumber daya manusia dalam bidang teknologi dan kejuruan yang berkualifikasi trampil dan profesional. Profesionalisme merupakan sifat utama atau faktor imperatif yang melekat pada masyarakat industri. Seorang profesional disamping menunjukkan penguasaan keahlian dan pengetahuan

huan dalam bidang yang ditekuninya, juga harus memiliki etika kerja spesifik. Beberapa atribut yang menunjukkan sikap profesionalisme antara lain adalah: (1) memiliki keterampilan tinggi didasarkan pada ilmu pengetahuan teoritis dan sistematis: (2) dapat memberikan jasa dan pelayanan yang altruistik artinya lebih berorientasi kepada kepentingan umum (baca: dunia usaha/dunia industri) ketimbang kepentingan pribadi (3) adanya kontrol yang ketat atas perilaku kerja (kompetensi) pekerja melalui kode etik yang di ayati dalam proses sosialisasi pekerjaan, dan (4) adanya sistem imbal jasa yang seimbang berupa uang, promosi jabatan, kehormatan, dll, yang merupakan lambang prestasi kerja.

Dalam memenuhi tuntutan era industrialisasi dan persaingan global sebagai market demand, pengembangan profesionalisme sekaligus etos/norma kerja di bidang pendidikan teknologi dan kejuruan tingkat menengah antara lain dipengaruhi oleh konsepsi, perilaku pelaksana dan tekno struktur yang mengkondisikan pembentukan tenaga kerja lulusan SMK. Ada beberapa hal mendasar tentang kelemahan visi dan perilaku jajaran SMK seperti kurang memiliki wawasan keunggulan, wawasan kualitas, wawasan ekonomi, kurang memiliki dan menyadari jiwa pendidik, dan kurang memahami prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan (.

Berdasarkan kondisi obyektif SMK di tahun tahun sebelum ini, maka reformasi di bidang program dan pelaku pendidikan di SMK merupakan hal yang tak terhindarkan dan tak dapat ditunda lagi.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

C.Hasil Pelaksanaan PSG.

Reformasi yang paling menonjol pada SMK di Indonesia saat ini adalah "penyesuaian" antara pola masa lalu dengan masakini, melalui pendekatan pendidikan sistem ganda. Walaupun secara teoritis masih saja diperdebatkan keunggulan dan kelemahan suatu sistem pendidikan namun sekarang ini PSG sudah menjadi kebijakan resmi karena dianggap merupakan pendekatan yang paling layak, dibanding pendekatan lainnya.

Penerapan PSG sebagai salah satu inovasi pendidikan telah memasuki tahun ketiga. Selama rentang waktu tersebut telah dicapai banyak perkembangan. Dilihat dari statistik, secara kuantitatif setiap tahun jumlah SMK yang telah melaksanakan PSG terus bertambah, demikian juga dengan jumlah DU/DI sebagai institusi pasangan dan daya tampung siswa PSG (lihat tabel). Peningkatan setiap indikator setiap tahun mencapai angka 100%. Suatu angka yang fantastis.

Tabel 1. Indikator Pelaksanaan PSG

TAHUN	SMK		DU/DI		DAYA TAMPUNG	
	NAS.	SUMBAR	NAS.	SUMBAR	NAS.	SUMBAR
1994/1995	249	9	9 078	325	36 788	2 646
1995/1996	503	21	11 214	662	62 487	3 685
1996/1997	Semua	28	20 000	-	125 000	-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

Tabel 2. Jumlah, Daya Tampung, dan Indikator Pelaksanaan PSG pada SMK di Sumatera Barat Tahun 1995/1996

KELOMPOK SEKOLAH	SMK NEGERI	SMK SWASTA	Jumlah Sekolah	JUMLAH SISWA(N)	JUMLAH SISWA PSG (%)	JUMLAH DU/DI
Teknologi dan Industri	8	19	27	8.348	1.042 (45%)	205
Pertanian dan Kehutanan	2	2	4	.904	.235 (100%)	56
Kesejahteraan Masyarakat	2	4	6	1.140	-	-
Bisnis dan Manajemen	13	29	42	9.933	2.739 (100%)	257
Pariwisata	1	2	3	1.114	.275 (100%)	73
Seni dan Kerajinan	3	1	4	.862	.243 (100%)	50
J u m l a h	29	57	86	22 331	4 534	661

Sumber: Informasi SMK Sumbar 1995, dan Pelaksanaan PSG pada SMK (Maznitos, 1996)

Disamping angka angka diatas, secara kualitatif telah terjadi pula arus perubahan dalam cara pandang dan perilaku berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan menengah kejuruan, baik dari pihak SMK sendiri, pihak DU/DI, maupun masyarakat pada umumnya. Perubahan tersebut terjadi antara lain;

Pertama, secara fenomenalis kebijakan link and match mulai memperlihatkan tanda berhasil mengubah cara pandang, sikap, perilaku pelaksana pendidikan kejuruan di lapangan. Jajaran Dikmenjur sudah menyadari bahwa SMK adalah bagian integral dari dunia usaha/industri dan masyarakat. Para konsumerlah yang lebih tahu tentang kebutuhan sumber daya, sehingga SMK harus proaktif mendekati dan menjual programnya ke DU/DI dan mengajak mereka untuk ikut berperanserta dalam totalitas aktifitas SMK.

Kedua, PSG secara bertahap telah menemukan bentuk atau sosok yang pas, yang memadukan secara serasi antara kegiatan belajar di sekolah dengan di lapangan kerja. Kendala kendala pelaksanaannya terus diatasi secara pasti. Wujud nyata kerjasama antara SMK dengan DU/DI dapat dlihat dari pembentukan MPKN, MPKP, HS, dan jumlah DU/DI yang telah aktif bekerja sama, serta daya tampung untuk siswa PSG. Jumlah DU/DI yang terlibat dan daya tampung siswa PSG terus meningkat.

Ketiga, yang sangat menggembirakan adalah bahwa pelaksanaan PSG telah memberikan umpan balik yang cepat bagi peningkatan mutu SMK. Semakin terbukanya tuntutan keahlian dasar yang diperlukan sebelum memulai PSG, memaksa SMK untuk meningkatkan mutu proses pendidikan di isekolah.

Indikasi lain adalah semakin meningkatnya rekrutmen tamatan SMK peserta PSG oleh perusahaan karena mereka telah mengetahui kemampuan lulusan, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk rekrutmen dan orientasi.

D. Kendala kendala Pelaksanaan PSG.

Di samping perkembangan yang telah dicapai, sebagai suatu inovasi pendidikan, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PSG. Beberapa kendala yang dapat diidentifikasikan adalah:

Pertama, visi, sikap, perilaku konvensional yang telah menjadi kebiasaan sebagian pembina dan pelaksana pendidikan kejuruan masih mewarnai unjuk kerja di sekolah dan terasa sulit berubah atau menyesuaikan diri terhadap tata nilai dan perilaku kerja.

Kedua, pelaksanaan proses pendidikan balum didukung oleh bahan ajar yang sesuai. Bahan dan buku ajar yang

tersedianya pada umumnya masih ditulis oleh guru-guru yang belum memiliki pengalaman kerja di industri atau oleh penulis yang diragukan kualifikasinya.

Ketiga, masih banyak industri yang belum terangkul, atau belum mau menerima siswa PSG untuk praktek kerja. Hal ini disebabkan antara lain karena belum memahami hakikat PSG, karena citra negatif yang melekat pada program PKL gaya lama, atau karena memang kondisi DU/DI yang belum siap terutama pada DU/DI berskala menengah dan kecil. Walaupun peningkatan dayatampung sudah menunjukkan pertumbuhan pesat (125 000 siswa), akan tetapi dilihat dari populasi siswa SMK Negeri dan Swasta yang membutuhkannya (1 580 000), kapasitas dayatampung yang ada di DU/DI baru 7,9% dari kebutuhan SMK. Dilihat dari kebutuhan instrukturpun, jumlahnya masih jauh dibawah keperluan.

Keempat, oleh karena beragamnya kondisi DU/DI di lingkungan SMK (padat-homogen, jarang-heterogen, atau kualitas industri justru di bawah kualitas SMK), maka model PSG yang sesuai untuk kebutahan setiap SMK masih terus dicari. Barangkali karena masih dalam tahap sosialisasi, setiap SMK perlu menemukan sendiri model yang paling aplicahle untuk diterapkan.

Kelima, sebagian besar guru kejuruan belum pernah mendapatkan pengalaman kerja di Industri, sehingga masih mengalami kesulitan memahami etos kerja berwawasan bisnis.

Keenam, PSG diharapkan dapat menghasilkan lulusan berkualifikasi terstandar, sedang di sisi lain sebenarnya kita belum memiliki standar kompetensi untuk setiap jenis dan jenjang jabatan. Penyusunan standar kompetensi dan standar profesi memerlukan tenaga dan waktu yang relatif besar, sehingga pemberian sertifikasi bagi

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

373.27
Cha
P.2

1714/K/97-P2(2)

serta PSG merupakan suatu hal yang memerlukan
nanganan khusus.

Kesimpulan

Demikianlah beberapa hal yang dapat dikemukakan
lam rangka memperluas wawasan bersama tentang pelaksa-
naan PSG pada SMK. Walaupun telah dicapai kemajuaan-
majuan yang nyata, namun masih banyak pula yang masih
rlu dibenahi di seluruh Indonesia. Pembenahan menda-
r yang perlu segera dilakukan antara lain menyangkut
ngembangan kurikulum, peranan MPKN-MPKP-MS, pengem-
ngan hubungan SMK dengan DU/DI, sistem bimbingan
swa, peranan guru dan instruktor, sistem administra-
, dan sistem penilain/sertifikasi.

Apakah PSG akan terbukti sebagai suatu strategi
ng paling jitu guna mengatasi masalah pada sektor
ndidikan menengah kejuruan, tentu akan sangat tergan-
ng pada visi, kiprah, dan konsistensi jajaran SMK
rsama unsur terkait untuk terus berbuat dan memerevisi
laksanaan di lapangan. Mudah-mudahan melalui seminar
i dapat dihasilkan suatu simpul dalam rangka mengha-
lkan lulusan yang berwawasan keunggulan.

Payakumbuh, 26 Desember 1997

SANDARAN PUSTAKA

akpahan, Jorlin. 1995.Kebijaksanaan Keterkaitan dan Kesepanan dalam Peningkatan Mutu SMK. Jakarta: Dir. PMK

——— Informasi SMK Sumatera Barat.1995. Padang: Kanwil Depdikbud Sumatera Barat.

aznitor. Pelaksanaan PSG pada SMK Sumatera Barat. Makalah disampaikan pada Seminar sehari di FPTK IKIP Padang, 1996